



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202019904, 27 Juni 2020

Pencipta

Nama : **Dr. Mohammad Yusri, M.Si**

Alamat : Griya Wisata Indah Blok J No. 4, Deli Tua, Namo Rambe, Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara, 20356

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Alamat : Jl. Kapten Mochtar Basri No. 3 Glugur Darat II, Medan Timur, Medan, Sumatera Utara, 20238

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Karya Ilmiah**

Judul Ciptaan : **Analisis Deskriptif Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Dan Kaitannya Dengan Pengembangan Wilayah Berkelanjutan**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 28 Februari 2016, di Medan

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000191836

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

ANALISIS DESKRIPTIF PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PEL) DAN KAITANNYA DENGAN PENGEMBANGAN WILAYAH BERKELANJUTAN

Oleh : Mohammad Yusri*)

Abstrak

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) merupakan proses di mana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan (Blakely and Bradshaw, 1994). Pengembangan ekonomi lokal (PEL) adalah suatu proses yang mencoba merumuskan lembaga-lembaga pembangunan di daerah, peningkatan kemampuan SDM untuk menciptakan produk-produk yang lebih baik serta pembinaan industri dan kegiatan usaha pada skala lokal. Jadi, pengembangan wilayah dilihat sebagai upaya pemerintah daerah bersama masyarakat dalam membangun kesempatan-kesempatan ekonomi yang cocok dengan SDM, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan kelembagaan secara lokal. Pemanfaatan ekonomi lokal diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi masyarakat yang tahan akan terpaan krisis serta melaksanakan ekonomi hijau.

Kata kunci : Pengembangan Wilayah, Berkelanjutan, Ekonomi Lokal.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Salah satu aspek terpenting dalam pengembangan wilayah adalah memasukkan konsep *local economic development* (LED). Swinburn, (2006) menyebutkan bahwa konsep LED adalah pengembangan kewirausahaan lokal diikuti dengan adanya pertumbuhan perusahaan-perusahaan lokal, kerja sama pemerintah daerah dengan swasta dan lembaga-lembaga lainnya. Pada dasarnya dalam mengelola sumber-sumber lokal yang potensial untuk mendorong aktivitas ekonomi, konsep ini beranggapan bahwa pengembangan wilayah sangat ditentukan oleh beberapa aspek. Aspek tersebut meliputi pertumbuhan industri lokal dan wiraswasta lokal yang ditopang oleh kelembagaan yang ada di wilayah tersebut.

Salah satu bentuk pengembangan ekonomi lokal dalam menopang pengembangan wilayah adalah usaha menengah kecil dan mikro (UMKM). UMKM mengutamakan intelektualitas sebagai karya utamanya, oleh karena itu pengendalian

*)Mohammad Yusri merupakan dosen tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

dan legalitas dari ekonomi masyarakat perlu adanya hukum kekayaan intelektual, paten, hak cipta merek, dan desain. Wirasawasta lokal adalah orang-orang yang menekuni unit usaha kreatif di daerah yang bersangkutan dengan menggunakan bahan baku lokal. Adapun kelembagaannya meliputi asosiasi kegiatan usaha, pemerintah daerah, pengusaha lokal termasuk universitas dan lainnya. Masalahnya adalah bagaimana memobilisasi potensi-potensi kelembagaan tersebut dan menjadikannya sebagai faktor pendorong pengembangan wilayah.

Produk UMKM diharapkan dapat berkembang pada semua lapisan dan sektor ekonomi, sekalipun UMKM baru tumbuh subur pada industri kecil dan kerajinan, namun belum menjangkau pada industri besar. Dengan demikian sumbangan dan peranan industri ini diharapkan dapat maksimal bagi pengembangan wilayah. Akan tetapi, yang terjadi saat ini industri kecil di Indonesia masih relatif terbatas pada jenis maupun produksinya, karena masih tertumpu pada industri makanan, pakaian, alat rumah tangga, kerajinan, bangunan dan lain-lain.

Pengembangan wilayah melalui PEL yang memprioritaskan peningkatan peran dan fungsi UMKM di Indonesia diyakini tidak terlalu sukar karena berbagai sebab dan alasan. Salah satunya adalah banyaknya industri kecil di Indonesia yang dapat menjadi cikal bakal pengembangannya. Data BPS tahun 2011 menunjukkan 96% dari 165.000 perusahaan di Indonesia adalah industri kecil berbasis rumah tangga. Sumbangan terhadap perekonomian sangat besar yakni 82,44% atau sekitar 159.000 perusahaan. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai potensi ekonomi lokal dalam menopang pengembangan wilayah.

Raharjo (2008) menyebutkan bahwa sekalipun potensi dan kondisi geografis masing-masing berbeda, namun pengembangan wilayah dengan pemanfaatan potensi lokal tentunya akan saling menopang antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Hal ini memerlukan sinergitas antar wilayah sangat diperlukan, mengingat kebutuhan bahan baku yang saling ketergantungan.

II. TINJAUAN KONSEPTUAL

2.1 Teori Pengembangan Wilayah

2.1.1 Teori Pengembangan Wilayah melalui *Local Economic Development*

Pengembangan wilayah dapat dilaksanakan melalui konsep ekonomi lokal (*local economic development*). Konsep pengembangan wilayah ini melalui pembuatan *networking* (jaringan) antara *stakeholder* yang ada pada pusat (*centre*) dengan *stakeholder* yang ada di daerah pedesaan.

Teori *local economic development* ini merupakan teori yang paling relevan dalam penulisan disertasi ini. Untuk mendapat gambaran bahwa pengembangan wilayah akan ditentukan bagaimana hubungan yang sinergis antara pemerintah daerah, lembaga masyarakat setempat, di wilayah yang bersangkutan. Hubungan tersebut terbentuk dalam rangka mendorong, merangsang dan memelihara aktivitas yang menghasilkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dengan demikian inti dari teori pengembangan ekonomi lokal atau *local economic development*

Ada beberapa definisi *local economic developmet* dari berbagai sumber. Secara berurutan dapat dilihat pada uraian sebagai berikut, diantaranya:

1. Blakely, Bradshaw (1994) *local economic developmet* atau pembangunan ekonomi lokal adalah usaha memaksimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah.
2. Ma'rif (2000) menyebutkan konsep *local economic development* berusaha memadukan konsep-konsep tersebut, dengan mengembangkan dan meningkatkan peran elemen-elemen *endogenous development* dalam kehidupan sosial ekonomi lokal dan melihat keterkaitan serta integrasinya secara fungsional dan *spasial* dengan wilayah yang lebih luas.

3. *International Labour Organization* (2001) menyebutkan bahwa *local economic development* adalah proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah, masyarakat pada wilayah tertentu. Memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan secara umum dengan menggunakan sumber daya lokal dan keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi.
4. A.H.J. Helming (2003) menyebutkan bahwa *local economic development* adalah suatu proses dimana kemitraan yang mapan antara pemerintah daerah, kelompok berbasis masyarakat, dan dunia usaha. Sumber daya yang ada diolah untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah tertentu. Menekankan pada kontrol lokal dan penggunaan potensi SDA, kelembagaan dan sumber daya fisik.
5. Menurut World Bank (2006) *local economic development* adalah suatu proses dimana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara aktifitas usaha untuk menciptakan lapangan kerja.

Tabel 2.1 Resume Implikasi Teori Pengembangan Wilayah melalui PEL atau *Local Economic Development (LED)*

No	Definisi oleh	Isu yang diangkat	Implikasi positif
1	Blakely dan Bradshaw, 1994	Meningkatkan daya saing yang berkelanjutan Berorientasi pemerataan Adanya kualitas pertumbuhan	Pemerintah, organisasi masyarakat, dunia usaha memiliki kepedulian terhadap pengembangan perekonomian lokal
2	Ma'arif, 2000	Meningkatkan daya saing yang berkelanjutan Berorientasi	Memadukan, mengembangkan dan meningkatkan peran elemen-elemen <i>endogenous development</i>

		pemerataan	
3	I L O, 2001	Proses partisipatif Lokasi pada wilayah tertentu Penciptaan lapangan kerja Merangsang kegiatan ekonomi	Orientasi <i>out put</i> dan proses <i>Stakeholder</i> yang partisipatif Penggunaan sumber daya lokal (SDM, SDA)
4	A.H.J. Helming, 2003	Adanya kualitas pertumbuhan Kemitraan antara stakeholder Kontrol lokal yang merangsang pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja	Berorientasi proses dan <i>output</i> Aspek lokasi lebih menonjol dalam pengembangan wilayah Penggunaan sumber daya lokal (SDM, SDA)
5	World Bank, 2006	Keterlibatan Pemerintah dan organisasi masyarakat	Mendorong, merangsang dan memelihara usaha Menciptakan lapangan kerja

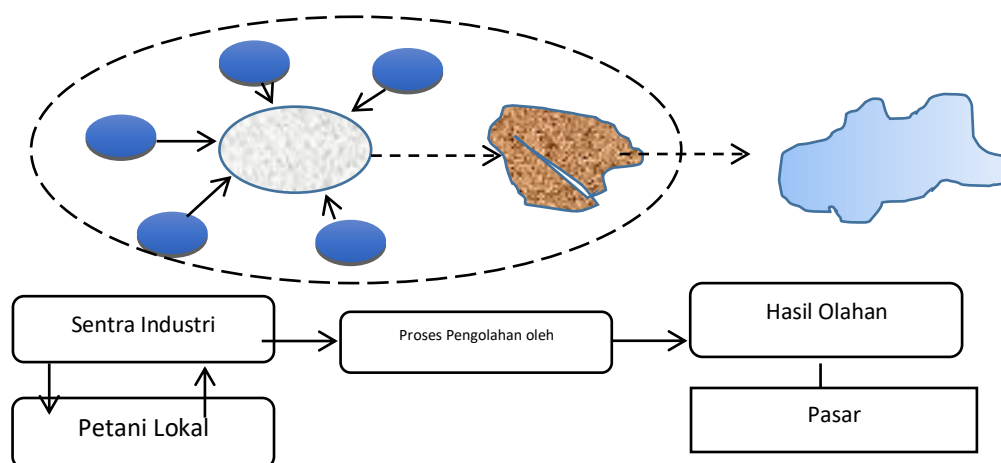
Selanjutnya Nijaki et al (2012) dalam hasil penelitiannya terkait pembangunan ekonomi lokal (PEL) hijau dapat dicapai dengan perpaduan bersama antara pelaksanaan program sebelumnya yang terfokus pada baik tujuan pembangunan ekonomi, atau pelestarian lingkungan. Hal ini ditemukan bahwa pelaksanaan program dapat digunakan sebagai alat yang layak dalam membina gol kedua ekonomi dan lingkungan, dan sebagai alat kebijakan dan perencanaan utama untuk pemerintah daerah dalam mengejar ekonomi hijau

Dari beberapa definisi pada Tabel 2.1 terdapat beberapa unsur penting pengembangan wilayah melalui ekonomi lokal. Pentingnya peran pemerintah, peran masyarakat, peran organisasi masyarakat, adanya pemanfaatan SDA (bahan baku) dan adanya tujuan dalam rangka menambah angkatan kerja di suatu wilayah tertentu.

Konsep ekonomi lokal mendasari pada upaya pengembangan kewirausahaan lokal serta tumbuh kembangnya perusahaan-perusahaan lokal, industri lokal, kerja sama pemerintah lokal dengan swasta dan lembaga-lembaga lainnya. Dalam mengelola sumber-sumber yang potensial untuk mendorong aktivitas ekonomi, konsep ini pada dasarnya beranggapan bahwa pengembangan wilayah sangat ditentukan oleh tumbuh kembangnya wiraswasta lokal dan industri lokal.





2.1.2 Kerangka Pengembangan Wilayah Melalui PEL

Oleh sebab itu terdapat korelasi yang positif bahwa pengembangan ekonomi lokal dapat dijadikan sebagai faktor pendorong pengembangan wilayah. Jika disimulasikan dalam bentuk gambar maka akan terlihat sebagai berikut :



Gambar 2.1 Ilustrasi Mohd. Yusri (2015) Pengembangan Wilayah Melalui *local economic development* atau Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)

Keterangan :

-  = Penghasil *Rauw Material*
-  = Pengumpul *Rauw Material* serta sentra Produksi Lokal
-  = Wilayah/ Pusat Kegiatan Lokal
-  = Wilayah Pemasaran

----> = Jalan

----- = Batas Wilayah Budidaya

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa inti dari teori pengembangan ekonomi lokal atau *local economic development* bersifat

1. Partisipatif yang melibatkan *stakeholders*,
2. Memiliki arah yang jelas yakni memanfaatkan SDM dan SDA setempat untuk pertumbuhan ekonomi lokal
3. Mengintegrasikan sistem nilai yang disepakati bersama seluruh *stakeholders*,
4. Terukur target pencapaiannya,
5. Terintegrasi kedalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dan
6. Berkelanjutan.

III. KAITAN KEGIATAN PENDUDUK DENGAN PEL DAN BENTUK WILAYAH BERKELANJUTAN

Hutabarat, S dan Stewart (1985), menyebutkan ada tiga corak kehidupan masyarakat di wilayah yakni dataran tinggi, dataran rendah dan wilayah pantai. Adapun kegiatan-kegiatan penduduknya sebagai berikut :

Pertama, penduduk yang tinggal di dataran tinggi mempunyai corak kehidupan penduduknya yang khas. Persediaan air yang relatif sedikit membuat terjadinya konsentrasi pemukiman penduduk pada tempat-tempat yang rendah seperti alur sungai. Hal ini terjadi karena penduduk berusaha agar mendapatkan persediaan sumber air yang mudah didapat di daerah tersebut. Perladangan yang digarap penduduk biasanya terletak di daerah lembah pegunungan.

Kedua, wilayah dataran rendah adalah daerah pantai sampai pada ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut merupakan suatu kawasan konsentrasi penduduk, hal ini diakibatkan sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan bisa dimaksimalkan untuk dikembangkan di wilayah dataran rendah. Bentuk wilayah yang

relatif datar juga dimungkinkan untuk mengembangkan sarana transportasi berupa jalan raya dan jalan kereta api, jalan raya antar daerah dalam kabupaten dan provinsi. Aktivitas mata pencaharian/pekerjaan penduduk relatif dapat berjalan dengan normal.

Ketiga, kawasan pantai merupakan daerah yang memiliki aktivitas ombak dan arus yang besar. Kawasan pantai yang memiliki ombak yang besar mengakibatkan nelayan tradisional menggantungkan kegiatannya dari sektor pemanfaatan pertanian dan perkebunan serta usaha sampingan. Sebaliknya pada kawasan pantai dengan keadaan air laut dan gelombang yang relatif tenang, kegiatan penduduknya adalah sebagai nelayan sebagai pekerjaan utama. Di wilayah kawasan wisata bahari inilah biasanya penduduk setempat seringkali mengembangkan industri kerajinan rakyat sebagai cinderamata bagi para wisatawan, usaha restoran dengan aneka ragam kuliner dengan bahan baku *sea food*, membuka penginapan hotel non bintang (penginapan-penginapan sederhana).

Abel Petrus (2014), Kondisi alamiah dan manusia pada dasarnya memiliki hubungan timbal balik. Hubungan inilah yang mengakibatkan manusia memiliki karakteristik berbeda-beda disetiap wilayahnya. Aktivitas penduduk di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis terutama kondisi fisiknya. Kondisi geografi fisik tersebut meliputi kondisi iklim, topografi, jenis dan kualitas tanah, serta kondisi perairan. Kondisi daratan dengan segala kenampakannya merupakan tempat tinggal manusia dengan segala aktivitasnya. Mulai dari ketinggian paling rendah yang terletak di pantai sampai daerah puncak gunung.

3.1 Aktivitas Penduduk yang Terkait pada Kondisi Alam

Corak kehidupan di daerah pantai. Penduduk umumnya bekerja sebagai nelayan, penjual jasa wisata, sektor perikanan dan perkebunan kelapa.

1. Corak kehidupan di daerah dataran rendah. Penduduk biasanya bekerja pada sektor pertanian, ladang dan bentuk pertanian lain. Selain itu sektor-sektor lain biasanya lebih cepat berkembang seperti transportasi, industri, dan perdagangan.
2. Corak kehidupan daerah dataran tinggi. Penduduk di daerah ini umumnya bekerja dalam sektor pertanian terutama perladangan.

3. Corak kehidupan daerah pegunungan. Penduduk di daerah ini umumnya bekerja dalam sektor pertanian, ladang dan buruh perkebunan

Pertama wilayah pegunungan, merupakan wilayah dengan deretan atau rangkaian gunung yang tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Pegunungan memiliki ketinggian 500 M di atas permukaan laut. Daerah pegunungan bisa berupa pegunungan berapi yang masih aktif, pegunungan ataupun pegunungan kapur. Untuk daerah pegunungan, secara umum masyarakatnya adalah petani, yang tentu saja pola pertaniannya berbeda-beda sesuai dengan kondisi pegunungan tersebut. Petani biasanya menanam palawija, sayur-mayur dan bunga. selain itu, ada juga petani yang bertanam berupa perkebunan, misalnya teh, kopi, cengkeh, pala dan buah-buahan. Karena terdapat perkebunan besar, banyak penduduk yang bekerja sebagai buruh perkebunan. Misalnya buruh di perkebunan teh, kopi dan cengkeh.

Selain itu banyak juga lapangan pekerjaan yang muncul sesuai perkembangan zaman, misal di pegunungan berapi potensi pasirnya sangat berlimpah dan itu akan menjadi lahan pekerjaan bagi masyarakat wilayah itu yaitu sebagai penambang pasir. Daerah pegunungan mempunyai iklim yang cukup dingin. Kondisi demikian cocok untuk memelihara ternak. misalnya sapi perah, kambing, kelinci, ayam pedaging dan ayam petelur. Untuk pola permukiman penduduk sangat dipengaruhi oleh kondisi topografi dan tingkat kesuburan tanah. Pola pemukiman penduduk di daerah pegunungan biasanya menyebar mengikuti lereng dan mengelompok pada daerah yang mempunyai lahan subur dan relatif datar.

Wilayah kedua adalah dataran tinggi, wilayah yang memiliki bentuk muka bumi yang relatif datar yang letaknya di daerah yang tinggi yaitu memiliki ketinggian antara 700-800 meter di atas permukaan laut. Wilayah Indonesia pada daerah dataran tinggi memiliki sistem pegunungan yang memanjang dan masih aktif. Relief daratan dengan banyaknya pegunungan dan perbukitan, menyebabkan Indonesia memiliki kesuburan tanah vulkanik, udara yang sejuk, dan alam yang indah. Relief daratan dengan banyak pegunungan dan perbukitan memiliki udara yang subur dan udara yang sejuk sehingga sangat diminati penduduk yang kegiatan utamanya di bidang pertanian. Sebagian besar penduduk juga masih banyak yang tergantung pada alam dan memanfaatkan hasil dari alam. Penduduk daerah pegunungan juga banyak yang memanfaatkan suhu udara yang dingin untuk menanam sayuran dan tanaman

perkebunan. Selain itu, relief daratan yang demikian juga memiliki potensi menjadi daerah pariwisata.

Wilayah ketiga, wilayah dataran rendah, wilayah ini merupakan daerah datar yang memiliki ketinggian hampir sama, yaitu 0-200 m di atas permukaan laut. Dataran rendah di Indonesia kebanyakan berupa dataran rendah *alluvial*, yaitu dataran rendah yang terbentuk akibat pengendapan hasil proses sedimentasi sungai. Oleh karena itu, umumnya daerah dataran rendah dijadikan sebagai tempat permukiman penduduk, mendirikan pabrik, membangun gedung, dan membangun jalan raya. Di Indonesia daerah dataran rendah merupakan daerah yang penuh dengan kedinamisan dan kegiatan penduduk yang sangat beragam. Daerah dataran rendah cocok dijadikan wilayah pertanian, perkebunan, peternakan, kegiatan, industri, dan sentra-sentra bisnis.

Lokasi yang datar, menyebabkan pengembangan daerah dapat dilakukan seluas mungkin. Pembangunan jalan raya dan jalan tol serta kelengkapan sarana transportasi ini telah mendorong daerah dataran rendah menjadi pusat ekonomi penduduk. Kemudahan transportasi dan banyaknya pusat-pusat kegiatan di daerah dataran rendah menarik penduduk untuk menetap disana. Oleh karena, itu penduduknya semakin bertambah dan kebutuhan tempat tinggal serta tempat usaha juga meningkat.

Lahan-lahan seperti sawah dan hutan sebagai penyangga keseimbangan alam semakin berkurang digantikan oleh tumbuhnya bangunan bertingkat. Hal ini banyak menimbulkan permasalahan, seperti daerah resapan air berkurang yang mengakibatkan banjir pada saat musim hujan dan kekeringan pada saat musim kemarau. Keanekaragaman aktivitas penduduk ini menunjukkan adanya heterogenitas mata pencaharian penduduk. Petani, pedagang, buruh dan pegawai kantor adalah beberapa contoh mata pencaharian penduduk daerah dataran rendah. Dataran yang berupa dataran rendah umumnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Tanaman yang cocok ditanam di daerah dataran rendah, antara lain kelapa, padi tebu, dan jagung.

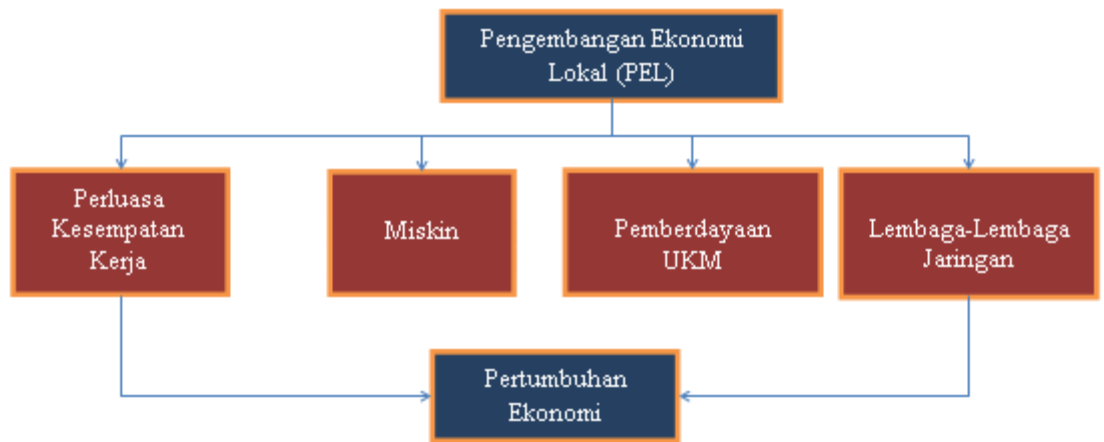
Wilayah keempat, yaitu wilayah pantai yang merupakan bagian daratan yang berbatasan dengan laut. Penduduk daerah pantai mempunyai karakteristik yang disesuaikan dengan keadaan daerahnya. Penduduk memilih mata pencaharian mereka sesuai dengan ketersediaan yang terkandung di alam. Sebagian besar penduduk

memilih bekerja sebagai nelayan dibandingkan bercocok tanam. Hal ini disebabkan kondisi tanah yang kurang baik untuk dimanfaatkan untuk bercocok tanam. Daerah pantai juga merupakan tempat wisata yang menarik, sehingga sebagian penduduk bekerja sebagai pengrajin dan penjual jasa. Disamping itu, daerah pantai juga dapat dijadikan sebagai tempat budidaya tanaman, meskipun penggunaannya hanya sebagai mata pencaharian sampingan. Beberapa jenis tanaman yang cocok di daerah pantai diantaranya adalah kelapa, semangka, melon dan buah naga. Aktivitas lain dari penduduk di daerah pantai adalah perikanan air payau. Perikanan ini diusahakan dalam bentuk kolam luas yang disebut tambak. Ikan yang banyak dibudidayakan pada tambak adalah ikan yang bernilai tinggi, seperti bawal, bandeng dan lobster. Selain itu terdapat pula penduduk yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani garam.

3.2 Pengembangan Model Manajemen Strategik berbasis UMKM Melalui PEL

Suriyadi (2007) menyebutkan bahwa keberhasilan Pengembangan Ekonomi Lokal(PEL) dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan berusaha.
2. Perluasan kesempatan bagi si miskin untuk meningkatkan pendapatan.
3. Keberdayaan lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan pemasaran.
4. Keberdayaan kelembagaan jaringan kerja kemitraan antara pemerintah, usaha swasta dan masyarakat lokal. Ilustrasinya dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1: Indikator Keberhasilan PEL
 Sumber : Supriyadi, 2007, Diolah

IV. ASPEK TATA RUANG DAN POTENSI PEL

Setiap wilayah yang ada di Kabupaten memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya binaan dan kegiatan sosial ekonomi yang beragam. Eriyanto (2011) menyebutkan bahwa dalam rangka mengurangi kesenjangan perkembangan tiap wilayah, maka diperlukan adanya intervensi yang dapat memberikan fungsi dan peran yang jelas untuk setiap wilayah sesuai dengan potensi, hambatan, dan tantangannya dalam bentuk suatu rencana struktur yang mempunyai hirarki keruangan. Rencana struktur yang dikembangkan tersebut mengoptimalkan masing-masing wilayah sehingga tercipta pemenuhan kebutuhan antara wilayah satu terhadap wilayah yang lainnya. Apabila sistem pemenuhan kebutuhan terjadi dalam jangka panjang berarti sistem pengembangan wilayah dapat berjalan sesuai dengan harapan. Salah satu contoh dapat dikemukakan di Kabupaten Deli Serdan Sumatera Utara sebagai berikut:

4.1 Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pada dasarnya Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi berdasarkan usulan pemerintah Kabupaten, setelah dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negri. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan dengan kriteria :

- a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan, dan/atau
- b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Berdasarkan arahan Rencana Sistem Perkotaan dalam RTRW Provinsi Sumatera Utara dan arahan Rencana Sistem Pusat Kegiatan dari Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Tanah Karo (Mebidangro), maka Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ditetapkan di Kabupaten Deli Serdang adalah PKL yang sudah ditetapkan oleh RTRW Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan pusat kegiatan sekunder yang diarahkan oleh RTR kawasan perkotaan Mebidangro yang tidak termasuk dalam PKL akan ditetapkan menjadi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Dengan demikian maka Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang, adalah :

1. Lubuk Pakam, dengan fungsi utama sebagai :
 - a. Pusat pemerintahan kabupaten;
 - b. Perdagangan dan jasa;
 - c. Kota transit;
 - d. Pusat pelayanan fasilitas sosial dan umum;
 - e. Permukiman perkotaan
2. Pancur Batu, dengan fungsi utama sebagai :
 - a. Perdagangan dan jasa regional (pasar induk dan terminal sayur);

- b. *Transit Oriented Development* (TOD)
- c. Pendidikan dan olah raga;
- d. Pariwisata;
- e. Perumahan dan permukiman.

4.2 Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Penetapan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Deli Serdang ditetapkan berdasarkan pertimbangan Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro dan potensi pengembangan Kabupaten Deli Serdang, dengan kriteria dan pertimbangan sebagai berikut;

1. Peluang pengembangan Kabupaten Deli Serdang sebagai kawasan metropolitan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Metropolitan Mebidangro (Medan-Binjai-Deli Serdang- Tanah Karo).\
2. Keberadaan Bandara Internasional Kuala Namu sebagai pusat transportasi regional.
3. Mensejajarkan wilayah Kecamatan Sibolangit (bagian selatan) dengan bagian wilayah lainnya.
4. Menghidupkan kembali bekas stasiun kereta api menjadi pusat pelayanan sekaligus menjadi pusat kegiatan dengan mengintegrasikan antara penggunaan lahan yang ada (konsep pengembangan *Transit Oriented Development*).
5. Peluang pengembangan potensi pertanian dan pariwisata di wilayah selatan Kabupaten Deli Serdang.
6. Ketersediaan jaringan jalan di selatan Kabupaten Deli Serdang yang menghubungkan dengan wilayah luarnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas serta mengacu kepada RTR Kawasan Perkotaan Mebidangro, maka Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Deli Serdang yang ditetapkan adalah : Tanjung Morawa, Batang Kuis, Percut Sei Tuan, Hampan Perak, Sunggal, Deli Tua, Pagar Merbau, Tembung, Namorambe, Sibolangit, Bangun Purba, Gunung Meriah, Patumbak, dan Galang.

Tembung adalah merupakan bagian dari Kecamatan Percut Sei Tuan, namun karena kecamatan ini diperkirakan akan cepat berkembang karena arahan struktur dan pola ruang RTR Kawasan Perkotaan Mebidangro, maka di Kecamatan Percut Sei Tuan terdapat dua pusat kegiatan, yaitu Percut Sei Tuan dan Tembung. Berdasarkan konsep pengembangan diatas, maka strategi untuk mewujudkannya adalah sebagai berikut;

1. Memaduserasikan dan kerjasama pembangunan kawasan industri dengan Kota Binjai maupun Kota Medan.
2. Pengembangan Kawasan *Aerocity* untuk mendukung keberadaan Bandar Udara Internasional Kuala Namu.
3. Membuka jalur regional (akses) masuk dan keluar Kabupaten Deli Serdang dengan prioritas memberikan akses untuk simpul kegiatan di Selatan Kabupaten Deli Serdang (Wilayah Sibolangit).
4. Rencana jalan *Inner Ring Road* dan *Outer Ring Road* Mebidangro.
5. Pengembangan sentra-sentra industri pertanian di bagian selatan Kabupaten Deli Serdang (Wilayah Sibolangit).
6. Peningkatan fungsi jalan yang menghubungkan simpul kegiatan wilayah selatan (Wilayah Sibolangit) dengan Bandar Udara Internasional Kuala Namu.
7. Pembangunan unit-unit pengumpul hasil pertanian di bagian selatan Kabupaten Deli Serdang.

4.3 Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan kecamatan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Pusat Pelayanan Lingkungan yang ditetapkan adalah kota-kota kecamatan diluar PKL dan PPK yang ditentukan berdasarkan fungsi dan potensi masing-masing desa dan kecamatan. Pusat Pelayanan Lingkungan di Kabupaten Deli Serdang yang ditetapkan antara lain adalah STM Hulu, STM Hilir, Sibiru-biru, Kutalimbaru, Pantai Labu, Beringin dan Labuhan Deli.

Fungsi utama yang dikembangkan pada Pusat Pelayanan Lingkungan tersebut diantaranya, adalah:

1. Pusat pelayanan pemerintahan kecamatan,
2. Pusat pengolahan hasil pertanian dan perkebunan,
3. Pusat distribusi dan koleksi hasil pertanian dan perkebunan,
4. Pusat pelayanan sosial tingkat kecamatan,
5. Permukiman perdesaan,

Berdasarkan uraian diatas maka secara hirarki perkotaan nasional, pusat pelayanan utama yang ada di Kabupaten Deli Serdang adalah Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai pusat perkotaan Hirarki I, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dengan Hirarki II serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang ditetapkan adalah pusat-pusat kota kecamatan yang ditentukan berdasarkan fungsi dan potensi masing-masing kecamatan sebagai Hirarki III.

Untuk lebih jelasnya mengenai sistem pusat-pusat pelayanan dapat dilihat salah satu contoh diadopsi dari Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Contoh Rencana Keterkaitan PEL Dengan Sistem Penataan Ruang.

No	Hirarki	Wilayah	Fungsi yang Dikembangkan
1	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Perkotaan/Ibukota	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat pemerintahan kabupaten; • Perdagangan dan jasa; • Kota transit; • Pusat pelayanan fasilitas sosial dan umum; • Permukiman perkotaan • Perdagangan dan jasa regional (pasar induk dan terminal sayur); • TOD • Pendidikan dan olah raga; • Pariwisata; • Perumahan dan permukiman.
2	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Perdagangan dan jasa lokal; • Industri; • Perumahan dan permukiman. • Perdagangan dan jasa lokal; • Pengolahan pertanian dan perkebunan; • TOD • Perumahan dan permukiman; • Kota transit • Perdagangan dan jasa regional; • Pengolahan pertanian dan perikanan; • Perumahan dan permukiman. • Industri; • Pusat pendidikan dan olah raga; • Perdagangan dan jasa;

No	Hirarki	Wilayah	Fungsi yang Dikembangkan
			<ul style="list-style-type: none"> • Industri; • Kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam); • Pariwisata, dan • Kegiatan Militer • Perumahan dan permukiman. • Perdagangan dan jasa lokal; • Industri; • Perumahan dan permukiman. • Perdagangan dan jasa regional (pasar induk sayuran); • TOD • Pelayanan sosial • Perumahan dan permukiman. • Perdagangan dan jasa lokal; • Pengolahan pertanian dan perkebunan; • Perumahan dan permukiman. • Perdagangan dan jasa; • Industri; • Perumahan dan permukiman. • Perdagangan dan jasa lokal; • Pengolahan pertanian dan perkebunan; • TOD • Militer • Perumahan dan permukiman. • Perdagangan dan jasa lokal; • Pariwisata; • Agropolitan

No	Hirarki	Wilayah	Fungsi yang Dikembangkan
			<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam) • Perumahan dan permukiman. • Pengolahan pertanian; • Kehutanan • Pengolahan pertanian; • Perumahan • Pariwisata • Pengolahan pertanian dan perkebunan; • Perumahan dan permukiman; • Pengolahan pertanian dan perkebunan; • Perumahan; • Industri; • Perdagangan dan jasa.
3	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan pertanian; • Kehutanan • Pariwisata • Pengolahan pertanian dan perkebunan; • Perumahan dan permukiman; • Kehutanan • Pengolahan pertanian; • Pariwisata • Pengolahan pertanian; • Kehutanan • Pengolahan pertanian dan perikanan; • RTH; • Perumahan dan permukiman;

No	Hirarki	Wilayah	Fungsi yang Dikembangkan
			<ul style="list-style-type: none"> • Perdagangan dan jasa. • Pengolahan pertanian dan perikanan; • Transpotasi; • Perdagangan dan jasa; • Perumahan dan permukiman • Pengolahan pertanian; • Perdagangan dan jasa;

Sumber : RTRW Kabupaten Deli Serdang Tahun 2010-2030 diolah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dengan konsep Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) yang diterapkan dalam industri kecil dan mikro dalam masyarakat, maka sesungguhnya dalam rangka melaksanakan kearifan lokal (*local wisdom*) untuk pengembangan wilayah berkelanjutan. Kearifan lokal terdiri dari dua kata: kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Dalam Kamus Inggris-Indonesia karya Echoles dan Sadili (2003), *local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Dengan kata lain, kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

5.2 Saran

Mengingat pentingnya Pengembangan ekonomi lokal bagi pengembangan wilayah berkelanjutan, ada baiknya dapat direkomendasikan sebagai sebuah kebijakan pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- A.H.J., Helming. 2003. *Local Economic Development: New Generations of Actors, Policies and Instruments for Africa*. Public Administration and Development, Africa.
- Albareda, L., LLozano, J., M., Tencati, A., Midttun, A., dan Perrini, F. 2008. The Changing Role of Governments in Corporate Social Responsibility: Drivers and Respons, *Business Ethic Eropcean Review*, Vol.17. No. 4, October 2008.
- Blakely dan Bradshaw, .1995. *Local Economic Development Analysis and Practice*, Sage Publication Inc. California.
- Blakely, Edward J., 1994. *Planning Local Economic Development (Theory and Practice)*. Sage Publications, In California.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2011, *Teknik Penyusunan Tabel Input Output*, Badan Pusat Statitik, Jakarta.
- Eriyanto, 2011. *Membangun Ekonomi Komparatif: Strategi Meningkatkan Kemakmuran Nusa dan Resiliensi Bangsa*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta
- ILO, 2013, *Creative Economy Report Widening Local Development Pathaways*, Special Edition.1983 dikutip Delee, 2012, *Magic of Creative Preneur*, ABNG Publishing, Jakarta.
- Ma'rif, Samsul, 2000, *Ekonomi Wilayah dan Kota, Ekonomika dalam Perencanaan Identifikasi Sektor Strategis*, Diklat Kuliah PWK UNDIP Semarang.
- Nijaki, Laurie Kaye; Worrel, Gabriela, 2012, *Strategi Manajemen Lingkungan, Ekonomi Lokal, PengadaanUmum; Pembangunan Berkelanjutan* International Journal of Manajemen Sektor Publik, Volume 25, Nomor 2, 2012, hlm 133-153. DOI: <http://dx.doi.org/10.1108/09513551211223785>
- Raharjo Adisasmita, 2008, *Pengembangan Wilayah* , Graha Ilmu Yogyakarta.
- Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang 2010-2030*, Dinas Kominfo Deli Serdang 2015.
- World Bank, 2001, *Local Economic Development*, Washington DC, Urban Development Unit.
- Swinburn, Gwen; Soraya Goga, and Fergus Murphy. 2006. *Local economic development: A primer developing and implementing local economic development strategies and action plans.*, Bertelsmann Stiftung, The World Bank.

